



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE
PROVINSI PAPUA
MASA RESES PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018

SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua.

Pemilihan provinsi Papua sebagai salah satu tujuan Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya *pertama* banyaknya isu strategis yang perlu segera diselesaikan diantaranya *pertama* program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dinstruksikan oleh Presiden RI diseluruh wilayah Indonesia, pasokan dan distribusi BBM. *Kedua*, program Papua Terang, sistem ketenagalistrikan dari pembangkit, transmisi dan distribusi. Persolan kelistrikan lainnya adalah masih banyaknya daerah di kawasan Indonesia Bagian Timur yang belum bisa menikmati listrik. *Ketiga*, persoalan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) MPP *dual firing* 50 MW yang saat ini masih menggunakan HSD sebagai bahan bakar. *Keempat*. Persoalan pajak air permukaan PT Freeport Indonesia dan persoalan lingkungan hidup.

Papua adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung timur Indonesia dengan ibukota Jayapura. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007. Nama provinsi ini kemudian diubah menjadi Papua sebagai provinsi dengan status otonomi khusus.

Secara geografis, Provinsi Papua merupakan pulau terbesar di Indonesai dan terbesar kedua di dunia dengan. Luas provinsi Papua adalah 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia. Bagian timur provinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya hutan, mineral, minyak dan gas bumi, maupun kekayaan alam perairannya.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya alamnya serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Adapun dampak negatif, salah satunya adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Tanah. Topografi wilayah Provinsi Papua sangat bervariasi. Wilayahnya berupa dataran hingga pegunungan dengan puncak-puncak yang tinggi. Lembah-lembah yang datar tersebar di sekitar Sentani, Jayapura, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel dan deiyai. Sementara itu, kelompok pegunungan dengan puncaknya yang mencapai 4.884 meter diatas permukaan laut diantaranya Pegunungan Puncak Cartenz, Puncak Jaya, Puncak Trikora, Pegunungan Jayawijaya, dan Maoke serta pegunungan lainnya. Berikut kami sajikan tabel topografi luas kemiringan lahan di Provinsi Papua.

Tabel 1. Profil Papua

Deskripsi	Profil Papua	Luas
Ibukota	Jayapura	309.934,4 km ²
Area	808.105 km ²	-
Populasi	4.247.758 jiwa	
Demografi (Etnis)	Papua (52%), Pendatang (48)	

Sumber: Profil Daerah Provinsi Papua, 2016

Banyak lahan di kawasan Provinsi Papua yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain digunakan sebagai sawah, lahan tersebut juga digunakan sebagai ladang/tegal seluas 340.275 Ha, perkebunan seluas 125.135 Ha, pemukiman seluas 121.403 Ha, usaha lain seluas 332.688 Ha, danau atau telaga seluas 4.531 Ha, dan tanah tandus atau tanah rusak seluas 82.197 Ha.

Secara geologis wilayah provinsi Papua memiliki potensi mineral yang melimpah. Walaupun demikian penyebarannya tidak merata. Penyebaran mineral yang tidak merata ini karena tidak meratanya penyebaran jenis batuan. Kondisi tektonik wilayah dan umur batuan sangat menentukan jenis mineral. Di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini diperkirakan terdapat sumber daya mineral yang berasal dari umur batuan tersier yang kaya akan minyak dan gas bumi. Sementara itu, sumber daya mineral tembaga dan emas terdapat di Kabupaten Mimika yang dioperasikan/eksplorasi oleh PT Freeport Indonesia.

Air. Provinsi Papua adalah provinsi yang memiliki banyak kekayaan laut. Kekayaan laut tersebut berupa bahan tambang, mutiara, keindahan karang dan berbagai jenis ikan. Salah satu kawasan perairan yang menjadi obyek wisata Provinsi Papua adalah danau Sentani. Untuk menjaga kelestarian bawah laut danau Sentani maka diperlukan usaha-usaha konservasi lingkungan termasuk biota dan ekosistem disekitar danau Sentani.

1.2. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar Hukum dari pelaksanaan Kunker Masa Reses adalah hasil Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang agenda kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua adalah untuk menyerap aspirasi, mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang perkembangan di provinsi Papua khususnya yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral,

ketenagalistrikan, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan Kunker adalah:

1. Untuk mendapatkan masukan dalam rangka tugas pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan pelaksanaan APBN serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya yang menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, serta Riset dan Teknologi.
 2. Menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang nantinya akan menjadi materi pembicaraan dengan mitra kerja yang terkait.
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- Hasil Kunker ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan, *budgeting* dan legislasi dibidang sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

1.4. AGENDA PERTEMUAN

Agenda pertemuan Kunker ke Provinsi Papua adalah:

- a. Pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemprov Papua, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua.
- b. Pertemuan dengan Direktur Program Pembinaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Anggota Komite BPH Migas, dan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero).
- c. Kunjungan lapangan ke danau Sentani dan PLTMG 50 MW di desa Holtekamp, Distrik Muara Tami Kota Jayapura bersama Direktur Regional Maluku Papua PT PLN (Persero) dan Manajemen PLTMG.
- d. Pertemuan dengan direksi/manajemen PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal EBTKE, Direktorat Jenderal Minerba dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Direksi PT Freeport Indonesia.
- e. Pertemuan dengan Direktur Pertambangan Minerba, Direktur EBKE Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Ristek Dikti serta LIPI, BPPT, LAPAN dan BIG

1.5. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua berjumlah 16 (enambelas) Anggota, dibantu 1 (satu) orang tenaga ahli, 3 (tiga) orang staf sekretariat, 1 (satu) orang dari TV Parlementaria dan 1 (satu) dari media cetak dan media sosial DPR RI. Daftar selengkapnya tertera pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI				
KE PROVINSI PAPUA				
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018				
TANGGAL 30 s/d 3 JULI 2018				
NO.	NAMA	NO. ANGG	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	298	FPG	KETUA TIM
2.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS	134	F.PDI-P	ANGGOTA
3.	TONY WARDOYO	231	F.PDI-P	ANGGOTA
4.	YULIAN GUNHAR, SH, MH	138	F.PDI-P	ANGGOTA
5.	TONY WARDOYO	231	F.PDI-P	ANGGOTA
6.	H.N. FALAH AMRU, SE	203	F.PDI-P	ANGGOTA
7.	Drs. KH. NAWAFIE SALEH, SE, MM	259	F.PG	ANGGOTA
8.	BAMBANG RIYANTO, SH, MH, MSi	357	GERINDRA	ANGGOTA
9.	RAMSON SIAGIAN	362	F.GERINDRA	ANGGOTA
10.	SAYED ABUBAKAR ASSEGAF	404	F.DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	TOTOK DARYANTO, SE	489	F.PAN	ANGGOTA
12.	H. AGUS SULISTYONO, ST, MT	61	F.PKB	ANGGOTA
13.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	83	F.PKB	ANGGOTA
14.	H. AHMAD H M ALI, SE	32	NASDEM	ANGGOTA
15.	FERRY KASE, SH	558	HANURA	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD NASIR	405	F.DEMOKRAT	ANGGOTA

BAGIAN II

HASIL PERTEMUAN

1.1. PERTEMUAN DENGAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua karena Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi Kalimantan Timur.

Persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua diantaranya:

- Persoalan pajak air tanah permukaan dengan PT Freeport Indonesia. Berdasarkan Perda biaya pajak air tanah permukaan adalah Rp 10 per m³. Berdasarkan Perda tersebut Pemprov Papua mem[unyai piutang pada PT Freeport Indonesia sekitar Rp 777,2 miliar. Hingga saat ini belum ada penyelesaiannya karena masih dipersengketakan di MA.
- Infrastruktur kelistrikan yang masih langka serta proses pengembangan tenaga listrik energi baru terbarukan masih terkendala harga.
- Pengembangan potensi wilayah Papua yang masih minim terutama promosi wisata danau Sentani melalui festival belum berjalan dengan optimal.
- Distribusi BBM jenis tertentu (Premium dan Solar) masih terkendala moda transportasi sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan.

Gambar 1: Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Sekda Papua



1.2. PERTEMUAN DENGAN DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO)

A. Data dan informasi

Daerah operasional MOR VIII meliputi provinsi Maluku (TBBM Saumlaki, TBBM Wayame, TBBM Tual, TBBM masehi, TBBM namlea dan TBBM , Maluku Utara (TBBM Tobelo, TBBM Ternate TBBM Labuha, Papua (TBBM Kaimana, TBBM Dobo, TBBM Jobber Timika, TBBM Nabire, TBBM Serui, TBBM Biak dan Papua Barat meliputi TBBM Fak-Fak, TBBM Sorong, TBBM Manokwari.

Konsumsi BBM (Premium, Peralite dan Pertamax) di provinsi Papua dan wilayah MOR VIII lainnya pada periode semester I (satu) tahun 2018 relatif stabil dengan kecenderungan terjadi peningkatan konsumsi BBM jenis Premium, namun proporsi peningkatannya tidak lebih dari 1 %. Proporsi konsumsi BBM pada Mei-Juli 2018 dengan komposisi Premium sebesar 57 % hingga 58 % dan sisanya 43 hingga 48 % masyarakat lebih memilih konsumsi Peralite dan Pertamax. Rata-rata konsumsi harian untuk BBM jenis Premium adalah 1.000 KL, Peralite 700 KL dan Pertamax 11 KL. Penjualan BBM industri khusus provinsi Papua sebesar 47.020 KL per bulan sedangkan untuk Papua Barat sebesar 11.890 KL per bulan.

Harga BBM jenis Premium adalah Rp 6.450 per liter dan untuk jenis Solar sebesar Rp 5.150 per liter. Sebelum adanya program BBM satu harga, harga BMM jenis Premium dan solar di provinsi Papua masing-masing bisa mencapai kisaran Rp 7000 s/d 50.000. Hal ini akibat biaya distribusi BBM sangat mahal mengingat moda transportasi dsitribusi BBM hingga samapai ke APMS dengan menggunakan mobil tangki, tongkang, dan air tractor dengan biaya distribusi per bulan di Papua dan Papua Barat adalah Rp 39,78 miliar.

Sementara itu cadangan operasional BBM di provinsi Papua cukup tinggi yaitu di atas cadangan operasional Nasional yaitu Gasoline (28 hari), Kerosene (30 hari) dan Solar (28).

B. Persoalan

Kendala pendistribusian BBM di provinsi Papua adalah kondisi geografis yang sangat berat serta masih kurangnya APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Implikasinya biaya distribusi BBM di Papua sangat mahal. Untuk daerah terpencil pendistribusian dilakukan dengan moda transportasi air tractor. Kendala BBM satu harga di Papua adalah

- Daerah terpencil belum mempunyai APMS
- Infrastruktur jalan yang minim
- Pembangunan APMS tidak ekonomis sehingga membutuhkan subsidi margin.

C. Usulan Solusi

Untuk menjamin ketersediaan BBM, efektivitas dan efisiensi biaya distribusi BBM di Papua sebaiknya supply BBM dialihkan dari kilang Bontang ke kilang Kasim. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi kilang mini Kasim dengan meningkatkan kapaistas kilang kasim dari kapasitas terpasang sebesar 10.000 BOPD menjadi 50.000 BOPD atau 100.000 BOPD.

Operasional kapasitas kilang Kasim saat ini hanya 80.000 BOPD. Hali ini disebabkan keterbatasan *supply crude oil*.

Untuk menunjang keberhasilan program BBM satu harga maka

- Pemerintah wajib menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk memperbanyak APMS diseluruh wilayah Papua.
- Perlu perhitungan margin yang berbeda antar APMS terutama didaerah terpencil.
- Perlu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
- Perlu pembangunan SPBU mini di tiap-tiap kecamatan. Karena itu Tim Kunker Komisi VII DPR RI mengharapkan adanya kordinasi antara Pemda setempat PT Pertamina (Persero).
- Data yang dilansir oleh BPH Migas dikatakan bahwa serapan BBM subsidi jenis tertentu (Premium dan Solar) dan BBM non subsidi pada tahun 2018 adalah sebesar 84 %.
- Rasio BBM subsidi dan Non subsidi sebesar 41 %. Tingginya angka rasio ini disumbangkan oleh banyaknya konsumsi Peralite dimana konsumsi Peralite 8x konsumsi Premium.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung rencana PT Pertamina (Persero) untuk membangun TBBM di Wamena namun pelaksanaannya harus sangat konservatif mengingat Wamena merupakan daerah rawan konflik.

1.3. KUNJUNGAN KE DANAU SENTANI DAN PLTMG JAYAPURA

A. Data dan Informasi

Danau Sentani merupakan danau terluas di Papua dengan kedalaman 76 m. Letaknya di antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Danau ini mempunyai luas 9.360 hektar dan berada di bawah lereng Pegunungan Cagar Alam Cyclops dengan ketinggian 75 mdpl.

Kondisi danau Sentani relatif bersih, hal ini diindikasikan dengan sedikinya sampah jenis anorganik seperti plastik dan jenis polimer lainnya.

Persoalan danau Sentani adalah DAS pada danau Sentani semakin menurun akibat meningkatnya pemukiman disekitar danau sentani. Implikasinya daerah tangkapan air menurun sehingga akan terjadi pendangkalan akibat sedimentasi. Dampaknya akan mengurangi tingkat keindahan, kenyamanan dan sebagai obyek pariwisata.

Gambar 2: Tim Kunker Komisi VII DPR RI di Danau Sentani



B. Data dan Informasi PLTMG MPP 50 MW

- Lokasi PLTMG Mobile Power Plant (MPP) 50 MW di kompleks PLTU 2 Papua, Desa Holtekamp, Distrik Muara Tami, kota Jayapura
- Kapasitas PLTMG adalah 50 MW
- Bahan bakar HSD, tetapi mulai Oktober 2018 bahan bakarnya gas yang didatangkan dari Bontang Kalimantan Timur sehingga diperkirakan bisa menghemat biaya sebesar Rp 383 juta per hari.
- Konsumsi HSD 0,23 liter/kwh sedangkan konsumsi gas 6.577 mmbtud.
- Tanggal dan nilai kontrak 21 Desember 2016 dengan nilai EUR 30.319.870,9 dan IDR440.396.414.924,22
- PLTMG MPP terdiri dari 6 unit dan daya nominal per unitnya adalah 12.225 KVA
- Luas Area 2,2 Ha

- Kontraktor pelaksanakan Konsorsium PT PP (persero) Tbk.- Wartsila finland Oy- PT Wartsila Indonesia
- Konsultan PT PLN (Persero)
- Penyerapan tenaga kerja sekitar 448 orang
- COD pada tanggal 28 November 2017
- Beroperasinya PLTMG maka bisa meningkatkan daya mampu sekitar 60 % sehingga sistem Jayapura menjadi lebih handal

C. KONDISI KELISTRIKAN DI PAPUA

- Wilayah kerja PT PLN (Persero) di Papua adalah 546.633 km² dengan jumlah pulau 3.749 pulau.
- Daya mampu 358,41 MW dengan beban puncak 294,24 MW serta panjang transmisi 218 km.
- Berdasarkan data PT PLN (Persero), rasio elektrifikasi papua sebesar 53, 62 % dengan rincian Papua 44,58 % dan Papua Barat 86,28 %. Namun berdasarkan perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Papua sebesar 71,6 %
- Rasio desa berlistrik 30,39 %.
- Jumlah pelanggan di Papua 355.558 pelanggan
- Jumlah desa di Papua adalah 3.518 dimana jumlah desa yang telah terlistriki oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2017 adalah 1.378 desa, sisanya masuk dalam program Papua terang. Untuk mengakselerasi program tersebut PT PLN (Persero) melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM, UI, UGM, ITB, UNCEN, LAPAN dan instansi lainnya dalam tajuk Ekspedisi Papua Terang. Program ini dilakukan melalui survei sehingga diperoleh data desa, data energi baru terbarukan serta data sistem kelistrikan desa.
- Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI telah melaksanakan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Pada tahun 2018 target pemasangan LTSHE di Papua adalah 1123 desa. Selain itu, Ditjen EBTKE juga melaksanakan

pemasangan lampu untuk penerangan jalan umum (PJU) di lima kabupaten di Papua.

D. Usulan Solusi Sistem kelistrikan di Papua

- Salah satu solusinya adalah dengan membangun PLTS dengan battery storage yang mampu bertahan selama 1 minggu yang diperuntukan bagi keluarga sederhana. Prinsip kerja battery storage seperti accu.
- Solusi lainnya yang lebih feasible adalah dengan memperbanyak pembangunan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
- Pemerintah perlu secara khusus mengatur harga jual produk listrik energi baru terbarukan (EBT) termasuk PLTS secara bijak sistem kelistrikan berbasis Ebt bisa berkembang secara optimal.

1.4. PERTEMUAN DENGAN DITJEN MIGAS DAN SKK MIGAS

Data umum

- Kegiatan eksplorasi studi seismik di blok Warim, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang Papua oleh Conoco Philips, tidak melanjutkan karena tidak ada penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan dengan wilayah Taman Nasional.
- Perusahaan migas yang masih beroperasi di Papua adalah South East Papua dan Nort Arafura
- Keberadaan *reserve* migas di sekitar perbatasan dengan Papua Nugini masih bersifat hipotetik sehingga perlu dilakukan studi seismik untuk memastikan ada tidaknya *reserve* migas.

1.5. PERTEMUAN DENGAN KEMEMTERIAN RISTEK & DIKTI RI, LPNK dan PT FREEPORT INDONESIA

Dalam pertemuannya, Kementerian Ristek dan Dikti RI menyampaikan jumlah program Bidikmisi di provinsi Papua tahun 2018. Berikut ini adalah data jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa dalam program Bidikmisi Kementerian Ristek dan Dikti

Tabel 3: Jumlah Penerima Program Bidikmisi 2018

Universitas	Jumlah Mhs Bidikmisi 2018
Univ Musamus Merauke	713
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	25
Universitas Cendrawasih	384

Sumber: Kementerian Ristek dan Dikti, 2018

LAPAN

- Menyediakan data citra satelit resolusi tinggi provinsi Papua dengan persentase sebesar 90 % data clear sementara sisanya 10 % belum clear
- Melakukan pemantauan pembukaan lahan sagu di Kecamatan Sentani
- Menyediakan data citra satelit lingkungan danau Sentani dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kebersihan lingkungan danau Sentani cukup terjaga dengan baik.
- Menyediakan data sistem pemantauan bumi satelit yang dipasang di kantor Gubernur dengan tujuan agar Gubernur bisa melihat kondisi Papua tanpa terjun ke lapangan
- LAPAN melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk mengidentifikasi pemukiman di daerah-daerah terisolasi (roof of) guna menyukseskan program Papua Terang
- Menyediakan data citra satelit pencemaran tailing yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dalam kurun waktu 2008 – 2016

BATAN

- Program BATAN di Papua adalah menyediakan teknologi dengan menggunakan isoptop 18 untuk mempelajari proses dan asal usul sedimentasi di danau Sentani

LIPI

- Salah satu program LIPI di Papua adalah menginisiasi terbentuknya Kebun Raya Wamena di Kabupaten Jayawijaya. Kebun raya ini merupakan satu-satunya kebun raya di provinsi Papua dengan luas 160 Ha atau duakali luas kebun raya Bogor

BIG

- Menyediakan hasil pemotretan udara diperoleh peta Papua dengan skala 1:50.000 dan skala 1:5000

PT FREEPORT INDONESIA

- Persoalan pajak air tanah Pemerintah Provinsi Papua dengan PT FI sebesar Rp 3,3 triliun periode tahun 2011 hingga Juli 2015 telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan memenangkan PT FI.
- Pajak air tanah untuk periode Agustus 2015 s/d Desember 2015, periode Januari 2016 s/d April 2016 dan Mei 2017 s/d April 2017 dengan nilai total sebesar Rp 777.185.771.587 masih dipersengketakan di pengadilan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pajak Air Tanah PT Freeport Indonesia, 2011-2017

PERIODE	POKOK (Rp)	DENDA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
2011 s/d 07/2015	-	-	-	Diputus MA
08/2015 s/d 12/2015	108.997.754.665	108.997.754.665	217.995.509.330	Dipersengketakan di MA
01/2016 s/d 04/2016	86.302.463.913	86.302.463.913	172.604.927.826	Dipersengketakan di PT
05/2016 s/d 04/2017	257.723.556.287	128.861.778.144	386.585.334.431	Dipersengketakan di PT
TOTAL			777.185.771.587	

Sumber: PT Freeport Indonesia, 2018

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tim Kunker Komisi VII DPR RI melalui Kementerian ESDM RI mendesak Pemerintah dan Direksi PT PLN (Pesero) untuk membuat standarisasi data rasio elektrifikasi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas.
2. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendesak Direktur EBTKE Kementerian ESDM RI dan Direksi PT PLN (Pesero) agar mengupayakan secara maksimal pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan agar program percepatan listrik perdesaan di Papua dapat tercapai sesuai target.
3. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendesak Direksi PT PLN (Pesero) untuk melibatkan pihak swasta dalam menyelesaikan persoalan sistem kelistrikan di provinsi Papua mengingat letak geografis Papua yang sangat luas dan penuh risiko.
4. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung sepenuhnya usulan Direksi PT Pertamina (Persero) agar dilakukan pembangunan SPBU mini di tiap-tiap kecamatan untuk menunjang suksesnya program BBM satu harga.
5. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung upaya yang dilakukan Kementerian LHK RI dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pemulihan daerah aliran sungai danau Sentani sehingga danau Sentani diharapkan bisa menjadi obyek wisata dan mampu memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Provinsi Papua.
6. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Pertambangan Minerba Kementerian ESDM RI agar memediasi penyelesaian persoalan pajak air tanah antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT Freeport Indonesia.
7. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung upaya LPNK dalam kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya alam di provinsi Papua dengan menggunakan teknologi citra satelit resolusi tinggi dan teknologi tepat guna lainnya.

8. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung Ditjen Migas Kementerian ESDM RI dan SKK Migas untuk melakukan upaya pengembangan potensi migas di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini.

B. Rekomendasi

1. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan Raker dengan Menteri ESDM serta RDP dengan BPH Migas dan Dirut PT Pertamina (persero) terkait persoalan distribusi BBM
2. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan RDP dengan Kepala SKK Migas terkait pengembangan potensi migas di perbatasan Papua dan Papua Nugini dan wilayah lainnya di Indonesia.
3. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT PLN (persero) terkait program listrik perdesaan dan persoalan sistem kelistrikan lainnya.

Jakarta, 6 Agustus 2018

Tim Kunker Komisi VII DPR RI

Ketua Tim

Ir. H. M. RIDWAN HISYAM